



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SAMBUTAN
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
PADA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI D.I
YOGYAKARTA 2017

Yogyakarta, 7 Maret 2016

*Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan,
Yang terhormat Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta
Yang terhormat Para Pejabat Eselon I yang mewakili Menteri terkait,
Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Provinsi D.I Yogyakarta,
Yang terhormat Para Anggota Muspida Provinsi D.I Yogyakarta,
Yang terhormat Para Bupati dan Walikota seluruh Provinsi D.I Yogyakarta,
Yang terhormat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi D.I
Yogyakarta,
Yang terhormat Para Tokoh Masyarakat, Akademisi, Wakil Organisasi
Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta
Hadirin peserta Musrenbang RKPD Provinsi D.I Yogyakarta yang kami
muliakan.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.*

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Provinsi D.I Yogyakarta. Pertemuan seperti ini sangat penting untuk bersama-sama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergi kebijakan pembangunan di dalam Provinsi D.I Yogyakarta sendiri maupun dengan kebijakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada kesempatan pagi hari ini, ada empat hal yang akan saya sampaikan, yaitu pertama mengenai kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan *Money Follow Program*. Kedua terkait dengan pendekatan pembangunan dalam penyusunan RKP 2017. Ketiga mengenai Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017. Dan yang keempat terkait dengan isu pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dalam konteks pembangunan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dalam beberapa bulan ini akan kita laksanakan merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional untuk mensinkronisasikan rencana pembangunan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dengan usulan/kebutuhan pembangunan Pemerintah Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pelaksanaan Forum Musrenbangnas yang berlangsung kadang dianggap sebagai forum yang bersifat “seremonial” saja.

Forum Musrenbangnas yang berlangsung kedepan diharapkan akan menghasilkan banyak kesepakatan yang tercapai. Namun mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan atau kebutuhan sangat banyak, maka Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyusun dan mengusulkan usulan rencana pembangunan yang benar-benar prioritas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.

Dalam hal perencanaan dan penganggaran, amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*). Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki kualitas belanja.

Perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara, penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Sementara Rencana Kerja Pemerintah yang sedang disusun saat ini baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat **prioritas pembangunan**, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dipertegas kembali bahwa RKPD yang disusun dengan **berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan**

oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Program Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Namun demikian, penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Sebagaimana arahan Bapak presiden, bahwa anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function* lagi, tetapi *money follow program prioritas*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Sehingga perlu memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Untuk itu, usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (*goal*) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.

Saat ini Bappenas bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas.

Holistik-Tematik digambarkan bahwa untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kemnterian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan serta Pemerintah Daerah. Integratif menunjukkan bahwa pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan *existing*, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan

pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya yang merupakan kombinasi berbagai program/kegiatan. Sedangkan spasial berarti pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain. Melalui pendekatan tersebut, saat ini Bappenas dan Kementerian Lembaga melakukan proses penetapan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang diturunkan dari Prioritas Nasional dalam telah tertuang dalam Visi-Misi dan Agenda Nawa Cita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Visi pemerintahan 2015-2019 yang dijabarkan dalam tujuh Misi Pembangunan dan sembilan Agenda Nawacita sebagai sasaran dan tujuan pembangunan 2015-2019 telah menetapkan berbagai Prioritas Nasional yang terbagi dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu. Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu **“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”**. Tema pembangunan 2017 yang menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 telah disepakati beberapa Prioritas Nasional yaitu antara lain (1) Revolusi Mental; (2) Pembangunan Pendidikan; (3) Pembangunan Kesehatan; dan (4) Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang merupakan bagian dari Dimensi Pembangunan Manusia. Sementara dari dimensi sektor unggulan antara lain (1) Kedaulatan Pangan; (2) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan; (3) Kemaritiman dan Kelautan; (4) Pariwisata; (5) Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimensi yang ketiga yaitu dimensi pemerataan dan kewilayahan meliputi (1) Pemerataan Antarkelompok Pendapatan; (2) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal; (3) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Pengembangan Konektivitas Nasional serta (5) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Seluruh Prioritas Nasional ini harus didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program dan dan Kegiatan Prioritas serta dari Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui pembagian Urusan Wajib dan Pilihan.

Saudara Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Sekarang mari kita lihat sejenak isu pembangunan dan rencana kerja pemerintah pada tahun 2017 dilihat dari kacamata Pemerintah Pusat. Secara nasional, isu yang paling penting dalam pembangunan regional adalah isu ketimpangan antar wilayah, baik di dalam konteks nasional, maupun dalam konteks pulau, provinsi maupun kabupaten. Dari

sisi kesenjangan golongan pendapatan (Gini Ratio) Provinsi D.I Yogyakarta juga memperlihatkan tren yang membaik dari 0,44 tahun 2013 menurun menjadi 0,42 tahun 2014. Meskipun demikian, data yang ada menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat masih tergolong rendah yang juga ditunjukkan dari tingkat kemiskinanyang masih cukup tinggi meskipun tingkat pengangguran rendah. Untuk itu, pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial yang sedang disusun oleh Bappenas dan Kementerian/Lembaga diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan. Beberapa sasaran pembangunan nasional

Sebenarnya tidak ada masalah dengan ketimpangan, karena memang secara alami tidak akan mungkin masing-masing pulau akan memberikan share yang sama kepada nasional. Banyaknya sumberdaya alam, kualitas SDM, kondisi sarana dan prasarana ekonomi dll memberikan kontribusi dalam hal produksi yang bisa dicapai oleh suatu pulau atau daerah. Yang jadi masalah adalah apabila ketimpangan itu bertambah lebar. Artinya kondisi ketimpangan alami tersebut menuju ketidakadilan akibat rekayasa kita sendiri. Disinilah mengapa kebijakan pembangunan regional harus memberikan koreksi terhadap ketimpangan tersebut. Berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengatasi masalah kesenjanga antara bagian utara dan bagian selatan pulau Jawa, dimana Provinsi D.I Yogyakarta berada di bagian tengah dan selatan wilayah Jawa serta juga dapat mendukung kepariwisataan yang menjadi andalan Provinsi D. I Yogyakarta.

Saudara Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kementerian PPN/Bappenas (atau Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (atau lintas SKPD) dan lintas wilayah dapat bertindak sebagai *system integrator* dan *resource allocator* antar K/L (antar SKPD) dan pemerintah daerah (atau pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.

Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan *money follow program* dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK yang *proposal based approach* dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional. Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata

atas usulan SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2015 – 2019 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Hal ini dikarenakan pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah (seluruh provinsi).

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 7 Maret 2016

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

ttd

Sofyan A. Djalil